

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Realisasi Keuangan			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	(Rp)	(%) Capaian	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	100%	85.20	17.892.944.750	15.244.175.696	85,20	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.08	122.560.000	111.628.873	91,08	
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	91,08	122.560.000	111.628.873	91,08	
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	84.96	11.307.977.940	9.606.896.397	84,96	
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / Bulan	56 Orang / Bulan	85,06	11.048.257.940	9.397.656.397	85,06	
2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	88,33	236.880.000	209.240.000	88,33	
2.3	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0,00	22.840.000	-	0,00	
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	1 Tahun	98.44	76.700.000	75.503.076	98,44	
3.1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	98,44	76.700.000	75.503.076	98,44	

4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	1 Tahun	76,76	324.137.500	248.812.510	76,76	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	94,43	200.000.000	188.856.510	94,43	
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	48,30	124.137.500	59.956.000	48,30	
5	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	85,33	1.045.154.930	891.848.940	85,33	
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	99,99	20.000.000	19.997.760	99,99	
5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99,95	88.750.000	88.707.788	99,95	
5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	99,90	40.000.000	39.960.666	99,90	
5.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48,44	28.921.000	14.008.000	48,44	
5.5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	65,49	104.000.000	68.109.045	65,49	
5.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	79,50	61.000.000	48.492.000	79,50	
5.7	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	21,10	30.000.000	6.330.000	21,10	
5.8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	90,15	672.483.930	606.243.681	90,15	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	99,26	1.215.000.000	1.205.990.966	99,26	

6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	99,36	800.000.000	794.868.003	99,36	
6.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	99,07	415.000.000	411.122.963	99,07	
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	83,55	2.520.414.380	2.105.816.124	83,55	
7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	50,00	20.000.000	10.000.000	50,00	
7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	77,85	460.000.000	358.132.124	77,85	
7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	85,16	2.040.414.380	1.737.684.000	85,16	
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	77,88	1.281.000.000	997.678.810	77,88	
8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	61,73	670.000.000	413.581.982	61,73	
8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	230 Unit	230 Unit	77,83	120.500.000	93.782.600	77,83	
8.3	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	99,80	90.000.000	89.818.098	99,80	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	100,00	400.500.000	400.496.130	100,00	
Urusan Komunikasi dan Informatika									

II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	80%	98,50	7.281.452.965	7.172.308.228	98,50	
		2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	70%	98,17	1.342.635.360	1.318.049.032	98,17	
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	80%	98,45	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45	
9.1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	100 Permohonan	98,32	44.121.226	43.379.125,00	98,32	
9.2	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	89,33	104.374.768	93.241.279	89,33	
9.3	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%	90%	82,97	44.218.713	36.687.447,00	82,97	
9.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	98,06	290.860.594	285.219.904,00	98,06	
9.5	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	99,81	3.617.588.882	3.610.889.136,00	99,81	
9.6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	7 Konten	7 Konten	90,72	508.191.920	461.011.314,00	90,72	
9.7	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas	17 Komunitas	96,23	39.708.363	38.210.784,00	96,23	

9.8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	100 Orang	89,58	81.091.132	72.641.298,00	89,58	
9.9	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	98,70	1.254.295.421	1.237.982.460,00	98,70	
9.10	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2 Laporan	2 Laporan	98,92	2.639.637.306	2.611.094.513,00	98,92	
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	90%	90%	95.75	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75	
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	100%	98.31	143.730.685	141.303.550	98,31	
10.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	98,31	143.730.685	141.303.550,00	98,31	
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%	90%	95.66	4.375.044.578	4.185.252.592	95,66	
11.1	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Layanan	1 Layanan	97,12	853.033.749	828.427.212,00	97,12	

		Daerah Provinsi							
11.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	96,13	580.669.880	558.200.780,00	96,13	
11.3	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	95,89	2.576.822.005	2.470.907.206,00	95,89	
11.4	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	95,55	54.703.250	52.269.420,00	95,55	
11.5	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	76,70	98.017.275	75.178.106	76,70	
11.6	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94,56	211.798.419	200.269.868,00	94,56	
Urusan Statistik									
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	89.96	348.513.210	303.075.324	86,96	
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	19.35	18.288.723	3.538.016	19,35	
12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	Persentase data yang tersedia	100%	100%	83.59	366.801.933	306.613.340	83,59	

12.1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	98,16	91.150.136	89.468.733	98,16	
12.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	100 Orang	19,35	18.288.723	3.538.016	19,35	
12.3	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	63,62	45.532.581	28.970.089,00	63,62	
12.4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	87,16	211.830.493	184.636.502,00	87,16	
Urusan Persandian									
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	92,28	204.607.238	188.812.827	92,28	
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	91,21	174.734.313	159.382.642	91,21	
13.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	62,65	27.970.055	17.522.758,00	62,65	
13.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	96,66	146.764.258	141.859.884,00	96,66	
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	98,52	29.872.925	29.430.185	98,52	

14.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	98,52	29.872.925	29.430.185,00	98,52	
	TOTAL				90,35	31.607.217.509	28.556.515.265	90,35	